



Arsip

**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR: 1 / 1 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, sebagaimana telah telah diundangkan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2016.

## Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bupati adalah Bupati Tanah Toraja;
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (3) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (4) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- (7) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- (8) Unit Kerja adalah sebagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- (9) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- (10) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (11) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (12) Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

## Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran;
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ke tiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS;

- (4) Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing SKPD sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/Unit kerja SKPD;
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

#### Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 80% dari realisasi jumlah SPP-UP;
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu penggunaan;
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
  - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
  - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan untuk:
    - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
    - Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah ditetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

#### Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Umum Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 8

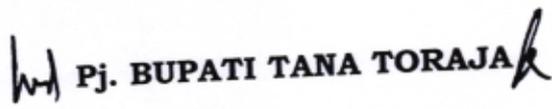
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 18 Januari 2016

 Pj. BUPATI TANA TORAJA



Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

  
ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
TANGGAL  
NOMOR

DAFTAR PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2016

| <b>NO</b> | <b>KODE ORGANISASI</b> | <b>NAMA SKPD</b>  | <b>JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)</b> |
|-----------|------------------------|---|---|
| 1         | 1.01.01                | DINAS PENDIDIKAN  | 2.291.911.471                             |
| 2         | 1.02.01                | DINAS KESEHATAN   | 2.530.137.249                             |
| 3         | 1.02.02                | RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA   | 3.873.670.833                             |
| 4         | 1.03.01                | DINAS PEKERJAAN UMUM  | 677.695.833                               |
| 5         | 1.05.01                | DINAS PEMUKIMAN DAN TATA RUANG  | 383.391.104                               |
| 6         | 1.06.01                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | 319.633.333                               |
| 7         | 1.07.01                | DINAS PERHUBUNGAN, INFORKOM DAN POSTEL  | 100.860.250                               |
| 8         | 1.08.01                | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   | 173.038.333                               |
| 9         | 1.08.02                | KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN, PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMADAM KEBAKARAN | 251.633.333                               |
| 10        | 1.10.01                | DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  | 92.043.750                                |
| 11        | 1.12.01                | BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                        | 229.224.167                               |
| 12        | 1.13.01                | DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA                             | 131.086.667                               |
| 13        | 1.15.01                | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH   | 95.114.167                                |
| 14        | 1.17.01                | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   | 289.938.333                               |
| 15        | 1.19.01                | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS  | 146.906.667                               |
| 16        | 1.20.02                | SEKRETARIAT DPRD  | 836.937.333                               |
| 17        | 1.20.03                | SEKRETARIAT DAERAH  | 1.333.292.500                             |
| 18        | 1.20.05                | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                | 763.690.030                               |

|    |         |  |                    |
|----|---------|--|--------------------|
| 19 | 1.20.06 | INSPEKTORAT DAERAH   | <b>158.296.667</b> |
| 20 | 1.20.07 | BADAN KEPEGAWAIAN,<br>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN<br>DAERAH     | <b>168.316.667</b> |
| 21 | 1.20.08 | BADAN PENAGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                        | <b>117.886.667</b> |
| 22 | 1.21.08 | BADAN KETAHANAN PANGAN<br>DAN PENYULUHAN DAERAH              | <b>267.505.667</b> |
| 23 | 1.22.01 | BADAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN LEMBANG | <b>173.172.917</b> |
| 24 | 1.24.01 | KANTOR ARSIP DAN<br>PERPUSTAKAAN                             | <b>41.791.667</b>  |
| 25 | 2.01.01 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN HOLTIKULTURA          | <b>253.739.413</b> |
| 26 | 2.02.01 | DINAS KEHUTANAN DAN<br>PERKEBUNAN                            | <b>230.867.325</b> |
| 27 | 2.03.01 | DINAS PERTAMBANGAN DAN<br>ENERGI                             | <b>97.547.417</b>  |
| 28 | 2.05.01 | DINAS PETERNAKAN DAN<br>PERIKANAN                            | <b>325.150.083</b> |
| 29 | 2.07.01 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN<br>PERDAGANGAN                       | <b>98.753.417</b>  |
| 30 | 1.20.09 | KANTOR PELAYANAN PERIZINAN<br>TERPADU                        | <b>56.200.000</b>  |
| 31 | 1.20.10 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                         | <b>123.479.167</b> |
| 32 | 1.20.11 | KANTOR PENGHUBUNG MAKASAR                                    | <b>53.708.333</b>  |
| 33 | 1.20.12 | KANTOR PENGHUBUNG JAKARTA                                    | <b>60.291.667</b>  |
| 34 | 1.20.14 | KECAMATAN MAKALE   | <b>47.445.083</b>  |
| 35 | 1.20.15 | KECAMATAN MAKALE UTARA                                       | <b>20.746.667</b>  |
| 36 | 1.20.16 | KECAMATAN MAKALE SELATAN                                     | <b>23.450.000</b>  |
| 37 | 1.20.17 | KECAMATAN SANGALLA'  | <b>16.190.000</b>  |
| 38 | 1.20.18 | KECAMATAN SANGALLA' UTARA                                    | <b>14.274.167</b>  |
| 39 | 1.20.19 | KECAMATAN SANGALLA'<br>SELATAN                               | <b>13.840.000</b>  |
| 40 | 1.20.20 | KECAMATAN MENGKENDEK   | <b>28.541.667</b>  |
| 41 | 1.20.21 | KECAMATAN GANDANGBATU<br>SILLANAN                            | <b>19.850.000</b>  |
| 42 | 1.20.22 | KECAMATAN SALUPUTTI  | <b>18.536.667</b>  |
| 43 | 1.20.23 | KECAMATAN REMBON   |                    |

|    |         |                                |                   |
|----|---------|--------------------------------|-------------------|
|    |         |                                | <b>27.515.833</b> |
| 44 | 1.20.24 | KECAMATAN MALIMBONG<br>BALEPE' | <b>24.064.167</b> |
| 45 | 1.20.25 | KECAMATAN RANTETAYO            | <b>22.821.667</b> |
| 46 | 1.20.26 | KECAMATAN KURRA                | <b>15.250.000</b> |
| 47 | 1.20.27 | KECAMATAN BONGGAKARADENG       | <b>19.429.583</b> |
| 48 | 1.20.28 | KECAMATAN RANO                 | <b>14.661.667</b> |
| 49 | 1.20.29 | KECAMATAN BITTUANG             | <b>14.811.667</b> |
| 50 | 1.20.30 | KECAMATAN MASANDA              | <b>18.007.292</b> |
| 51 | 1.20.31 | KECAMATAN SIMBUANG             | <b>20.143.333</b> |
| 52 | 1.20.32 | KECAMATAN MAPPAK               | <b>18.895.000</b> |
| 53 | 1.20.33 | KELURAHAN BOMBONGAN            | <b>5.368.917</b>  |
| 54 | 1.20.34 | KELURAHAN TONDON MAMULLU       | <b>5.630.750</b>  |
| 55 | 1.20.35 | KELURAHAN PANTAN               | <b>5.470.417</b>  |
| 56 | 1.20.36 | KELURAHAN BUNTU BURAKE         | <b>4.861.250</b>  |
| 57 | 1.20.37 | KELURAHAN KAMALI PENTALUAN     | <b>5.994.583</b>  |
| 58 | 1.20.38 | KELURAHAN BATUPAPAN            | <b>5.152.083</b>  |
| 59 | 1.20.39 | KELURAHAN RANTE                | <b>5.335.417</b>  |
| 60 | 1.20.40 | KELURAHAN TARONGKO             | <b>4.304.583</b>  |
| 61 | 1.20.41 | KELURAHAN LAMUNAN              | <b>5.745.417</b>  |
| 62 | 1.20.42 | KELURAHAN TAMPO MAKALE         | <b>4.624.583</b>  |
| 63 | 1.20.43 | KELURAHAN MANGGAU              | <b>5.365.167</b>  |
| 64 | 1.20.44 | KELURAHAN ARIANG               | <b>4.561.250</b>  |
| 65 | 1.20.45 | KELURAHAN BOTANG               | <b>5.228.750</b>  |
| 66 | 1.20.46 | KELURAHAN LAPANDAN             | <b>5.237.917</b>  |
| 67 | 1.20.47 | KELURAHAN TAMBUNAN             | <b>4.248.750</b>  |

|    |         |                             |           |
|----|---------|-----------------------------|-----------|
| 68 | 1.20.48 | KELURAHAN LION TONDOK IRING | 4.172.167 |
| 69 | 1.20.49 | KELURAHAN BUNGIN            | 4.565.833 |
| 70 | 1.20.50 | KELURAHAN SARIRA            | 6.132.167 |
| 71 | 1.20.51 | KELURAHAN LEMO MAKALE UTARA | 5.026.666 |
| 72 | 1.20.52 | KELURAHAN TIROMANDA         | 5.035.000 |
| 73 | 1.20.53 | KELURAHAN SANDABILIK        | 4.883.333 |
| 74 | 1.20.54 | KELURAHAN TOSAPAN           | 4.822.500 |
| 75 | 1.20.55 | KELURAHAN PASANG            | 4.791.667 |
| 76 | 1.20.56 | KELURAHAN BUNTU MASAKKE     | 5.644.417 |
| 77 | 1.20.57 | KELURAHAN TONGKO SARAPUNG   | 5.229.542 |
| 78 | 1.20.58 | KELURAHAN LEATUNG           | 4.664.583 |
| 79 | 1.20.59 | KELURAHAN BEBO'             | 4.694.167 |
| 80 | 1.20.60 | KELURAHAN RANTE ALANG       | 5.076.250 |
| 81 | 1.20.61 | KELURAHAN RANTEKALUA'       | 5.104.583 |
| 82 | 1.20.62 | KELURAHAN TAMPO MENGKENDEK  | 4.782.975 |
| 83 | 1.20.63 | KELURAHAN LEMO MENGKENDEK   | 4.790.833 |
| 84 | 1.20.64 | KELURAHAN TENGAN            | 5.750.000 |
| 85 | 1.20.65 | KELURAHAN BENTENG AMBESO    | 4.768.333 |
| 86 | 1.20.66 | KELURAHAN SALUBARANI        | 5.440.417 |
| 87 | 1.20.67 | KELURAHAN MEBALI            | 4.885.667 |
| 88 | 1.20.68 | KELURAHAN PATTAN ULUSALU    | 4.863.750 |
| 89 | 1.20.69 | KELURAHAN REMBON            | 4.643.333 |
| 90 | 1.20.70 | KELURAHAN TALION            | 4.175.000 |
| 91 | 1.20.71 | KELURAHAN MALIMBONG         | 5.420.000 |
| 92 | 1.20.72 | KELURAHAN RANTETAYO         | 5.153.333 |

|    |         |                       |           |
|----|---------|-----------------------|-----------|
| 93 | 1.20.73 | KELURAHAN RATTE BUTTU | 5.341.667 |
| 94 | 1.20.74 | KELURAHAN BITTUANG    | 4.694.583 |
| 95 | 1.20.75 | KELURAHAN SIMA        | 4.925.583 |
| 96 | 1.20.76 | KELURAHAN KONDODEWATA | 5.229.167 |
| 97 | 1.20.77 | KELURAHAN RANTE KURRA | 4.294.083 |
| 98 | 1.20.78 | KELURAHAN TAPPARAN    | 4.625.000 |
| 99 | 1.20.79 | KELURAHAN PADANGIRING | 4.876.667 |

*hnd* Pj. BUPATI TANA TORAJA *k*



**Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si**